

Efektivitas Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Bangun Kecamatan Pungging Mojokerto

Ferisha Ainurrahmasari Purwanto*, Hendra Sukmana

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Mojopahit No. 666 B, Kelurahan Sidowayah, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, 61215, Indonesia.

*hendra.sukmana@umsida.ac.id

Article History:

Received	: 32/12/2025
Received in revised form	: 10/02/2026
Accepted	: 11/08/2026

Abstract: The objective of this research is to evaluate how the BPNT-Cash Food Assistance (BPNT) program is executed in Bangun Village by focusing on the accuracy of targeting, mechanisms of service delivery, and the effectiveness of data management via the SIKS-NG system. A qualitative methodology was adopted, which included comprehensive interviews with the Welfare Affairs Officer and the Village Head, observations in the field, and analysis of documents related to digital recipient data. Results show that the processes for verification and validation are carried out through a mix of electronic registration alongside assessments conducted by village authorities. The village is crucial in maintaining data reliability, handling grievances, and working with BPNT facilitators to rectify data issues. Nonetheless, the SIKS-NG system only presents data from the current year, which restricts the village's capacity to assess the long-term continuity of beneficiaries. Therefore, while the BPNT is implemented in accordance with operational guidelines, it still encounters structural issues due to the limitations of the information system.

Keywords: BPNT ; targeting accuracy ; policy implementation ; SIKS-NG ; social assistance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun dengan memperhatikan ketepatan sasaran, mekanisme layanan, serta efektivitas pengelolaan data menggunakan sistem SIKS-NG. Metode kualitatif diterapkan melalui wawancara mendalam dengan Kaur Kesra dan Kepala Desa, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen digital yang berhubungan dengan daftar penerima. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi penerima BPNT dilaksanakan melalui kombinasi pencatatan secara digital dan pemeriksaan nyata oleh perangkat desa. Perangkat desa memiliki peran penting dalam menjamin konsistensi data, menangani keluhan, serta mengkoordinasikan pemutakhiran data bersama pendamping BPNT. Namun, sistem SIKS-NG hanya menunjukkan data untuk tahun ini, sehingga membatasi kemampuan desa dalam mengevaluasi keberlanjutan penerima untuk jangka panjang. Dengan demikian, meskipun telah memenuhi prosedur operasional, pelaksanaan BPNT masih menghadapi tantangan struktural pada aspek sistem informasi.

Kata kunci: BPNT ; ketepatan sasaran ; implementasi kebijakan ; SIKS-NG ; bantuan sosial

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan ketidakpastian dalam ketersediaan makanan masih merupakan masalah utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam mencapai Tujuan SDGs Pertama (penghapusan kemiskinan) dan Tujuan Kedua (penghapusan kelaparan) (Hadita et al., 2021). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47% yang setara dengan sekitar 23,85 juta orang, merosot 0,10% dibandingkan September 2024, sementara angka kemiskinan ekstrem mencapai 0,85% atau sekitar 2,38 juta orang berdasarkan garis kemiskinan Rp609. 160 per kapita dalam sebulan (Widiati, 2024). Walau demikian, penurunan ini belum menunjukkan perbaikan yang berarti dalam kualitas hidup, karena masyarakat yang hidup dalam kemiskinan masih menghadapi tekanan inflasi pangan setelah pandemi COVID-19, ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi antar wilayah, serta besarnya kerentanan terhadap perubahan ekonomi. Efek dari situasi ini berpengaruh luas terhadap ketahanan pangan, kesehatan, serta kestabilan sosial-ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan yang tidak cuma meningkatkan pendapatan, namun juga memperkuat sistem perlindungan sosial yang responsif dan bisa beradaptasi (Nizar Purnama, 2023).

Prevalensi stunting pada anak balita merupakan indikator yang krusial dalam ketahanan pangan, karena terkait dengan masalah kekurangan gizi yang berlangsung lama, yang bisa berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp300 triliun per tahun akibat berkurangnya produktivitas di masa depan (Alfia, 2016). Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, angka stunting di tingkat nasional telah turun dari 21,5% pada 2023 menjadi 19,8%, meskipun masih melebihi target 18,8% yang ditetapkan dalam Stranas Stunting 2025 (Rahmawati, 2024). Dalam rangka mempercepat penurunan stunting, intervensi bantuan pangan yang menjadi salah satu pilar terbukti efektif dengan odds ratio (OR) mencapai 2,62 pada keluarga yang kurang mampu (Sitompul & Rajagukguk, 2024). Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang menekankan pentingnya perlindungan sosial dan pemenuhan hak atas pangan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Untuk mendukung inisiatif ini, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan (Feny Sahara et al., 2022). Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) juga diterapkan melalui sistem perbankan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi distribusi, ketepatan sasaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan (Pramesti et al., 2019). Pendekatan ini diperkuat dengan upaya peningkatan kualitas layanan sosial yang berlangsung secara berkelanjutan (Oktavia & Djamaluddin, 2024).

Untuk memberikan pandangan yang lebih terstruktur mengenai kondisi saat ini, Tabel 1 menyajikan ringkasan statistik terbaru mengenai kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia

Tabel 1. Statistik Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Indonesia pada Tahun 2024

Indikator	Nilai
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,47
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	23,85 juta
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	609.160
Prevalensi Stunting (%)	19,8 (SSGI 2024)
Kemiskinan Ekstrem (%)	0,85

Sumber; Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan informasi dari Tabel 1, terdapat perubahan pada indikator kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Pada bulan Maret 2025, angka kemiskinan tercatat di angka 8,47% atau setara dengan 23,85 juta orang, dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,85%. Di sisi lain, angka stunting mengalami penurunan dari 21,5% di tahun 2023 menjadi 19,8% di tahun 2024, meski masih melebihi target nasional sebesar 18,8% pada tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masalah ketahanan pangan dan gizi tetap menjadi tantangan yang signifikan dalam pembangunan nasional. Sebagai langkah strategis, pemerintah telah menjalin Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejak tahun 2017 yang berbasis teknologi digital (Praja, 2020).

Program ini memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Permensos Nomor 11 Tahun 2018, serta Inpres Nomor 4 Tahun 2022 (Firdausya & Ompusunggu, 2023) pelaksanaannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp200. 000 per bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk membeli makanan bergizi (Putra et al., 2022). Pelaksanaan BPNT mengikuti prinsip 6T untuk memastikan akurasi dan tanggung jawab program (Tris Dina Susanti, 2024). Dari segi sosial, BPNT memiliki peran

dalam meringankan beban pengeluaran, memperluas akses terhadap pangan bergizi, serta mendukung pengentasan kemiskinan multidimensional dan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Puspita, 2023).

Peranan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam meningkatkan akses pangan dan kesejahteraan masyarakat terlihat dari kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,5 poin persen, terutama pada rumah tangga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Nazalia & Riyadh UB, 2022). Program ini juga berperan dalam memperkuat ketahanan pangan dalam kerangka Stranas Stunting dengan meningkatkan asupan gizi, terutama protein hewani, yang dapat mengurangi angka stunting hingga 15 persen pada kelompok penerima manfaat. Berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai dengan syarat tertentu, BPNT lebih fokus pada penyediaan pangan non-tunai dan merupakan pengembangan dari program Rastra/Raskin (Sahara et al., 2022). Melalui penerapan digital, BPNT memberikan kebebasan kepada penerima untuk memilih jenis bahan pangan, mengurangi kebocoran dalam distribusi, serta meningkatkan mutu bantuan. Hingga tahap III (Juli–September 2025), penyaluran BPNT telah mencapai 82,95% dari target 18 juta KPM, yang mencerminkan peningkatan efektivitas dalam distribusi bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan transparan (Normalita et al., n.d.).

Di tingkat lokal, pelaksanaan BPNT di Kabupaten Mojokerto dilakukan melalui mekanisme terstruktur, mulai dari penentuan KPM berdasarkan DTKS yang diverifikasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan difasilitasi oleh TKSK, hingga penyaluran bantuan melalui Bank Himbara, khususnya BNI. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat dipakai di e-warong untuk membeli bahan pangan secara non-tunai. Sistem ini mendukung pencatatan transaksi digital yang meningkatkan transparansi dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial dan TKSK memiliki peran dalam memberikan dukungan teknis serta menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan, ditopang oleh pengawasan dari inspektorat dan mekanisme pengaduan yang berjenjang. Pendekatan ini menunjukkan usaha integratif dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan program dalam memperkuat ketahanan pangan di masyarakat.

Berikut disajikan data perkembangan Program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT) di Kabupaten Mojokerto selama periode 2021–2024, yang menunjukkan arah pelaksanaan dan dampak kebijakan terhadap masyarakat miskin di tingkat lokal:

Tabel 2. Data Perkembangan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2024

Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Nilai Bantuan (Rp/KPM/Bulan)
2021	36.000 KPM	Rp150.000
2022	35.691 KPM	Rp200.000
2023	34.500 KPM	Rp200.000
2024	83.589 KPM	Rp200.000 + 10 kg beras

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (2025); BPS Kabupaten Mojokerto (2024) diolah Peneliti, 2025

Data yang terdapat di Tabel 2 menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mojokerto telah mengalami perubahan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan hubungan antara kemampuan pemerintah dalam memverifikasi data dan kondisi ekonomi sosial komunitas. Sejak fase konsolidasi pada 2021 melalui digitalisasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan e-warong, program ini terus berkembang, dan pada 2022 berperan dalam pengurangan tingkat kemiskinan sebesar 10,62 persen. Namun, peningkatan jumlah penerima manfaat pada 2024 yang mencapai lebih dari 83 ribu KPM menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi setelah pandemi dan inflasi pangan masih tinggi, sehingga BPNT beralih dari bantuan yang sifatnya kompensatif menjadi alat strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan daya beli masyarakat. Perubahan ini juga terlihat dari upaya memperluas jaringan e-warong dan verifikasi data hingga tahun 2025, yang menjadikan pengelolaan bantuan lebih inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tingkat lokal, Desa Bangun yang terletak di Kecamatan Pungging dengan populasi sekitar lima ribu orang yang mayoritas bekerja sebagai petani, buruh, dan pelaku usaha mikro, menjadikan BPNT sebagai pilar utama bagi ketahanan pangan. Program ini, yang didanai oleh pemerintah pusat dan anggaran daerah, sangat penting dalam memperkuat perlindungan sosial yang berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta menjaga kesejahteraan masyarakat yang rentan (Mawarda et al., 2025).

Berdasarkan observasi lapangan, pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dilaksanakan melalui penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan sistem perbankan. Meskipun demikian, pelaksanaannya tetap mengikuti pedoman dari Kementerian Sosial dan disesuaikan dengan kondisi setempat agar lebih efisien. Setiap KPM mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai rekening sekaligus alat untuk bertransaksi, dengan bantuan sebesar Rp200. 000 per bulan yang ditarik setiap tiga bulan sekali sehingga totalnya mencapai Rp600. 000 untuk setiap periode. Dana ini dapat diambil melalui agen bank atau Bank BNI dengan pengawasan dari TKSK dan aparat desa untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena mempercepat distribusi dan mengurangi ketergantungan pada e-warong, meskipun masih ada beberapa masalah teknis seperti kehilangan kartu ATM, lupa PIN, dan keterlambatan dalam transfer yang ditangani melalui kerja sama antara KPM, TKSK, perangkat desa, bank, dan Dinas Sosial. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi lokal tanpa mengubah sasaran utama program, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin dan rentan.

Berikut adalah informasi mengenai jumlah penerima pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bangun serta wilayah Kecamatan Pungging secara umum, sebagai gambaran empiris terkait implementasi kebijakan sosial yang berfokus pada bantuan pangan di tingkat local.

Tabel 3. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BPNT di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto

Tahun	Program BPNT (KPM)
2022	90
2023	95
2024	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto (2025), DTKS (2025), dan hasil observasi lapangan.

Berdasarkan Tabel 3, terdapat peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dan PKH di Desa Bangun, yang menunjukkan adanya ekspansi dalam perlindungan sosial, yang terkait dengan perubahan kondisi ekonomi masyarakat setelah pandemi. Peningkatan ini dapat dipandang sebagai hasil dari pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lebih adaptif dalam menjangkau kelompok-kelompok rentan yang baru, sehingga bantuan menjadi lebih inklusif dan

responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi (Hermawan, 2021) Secara empiris, ini menunjukkan peran aktif pemerintah daerah bersama dengan TKSK dan perangkat desa dalam memperkuat jaring pengaman sosial, meskipun di sisi lain menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan, khususnya di daerah semi-perdesaan. Penemuan (Ridwansyah et al., 2024) menekankan bahwa BPNT berfungsi efektif dalam memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga miskin, namun harus diimbangi dengan penguatan aspek pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, meskipun program BPNT sudah berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketepatan data, distribusi bantuan, dan kurangnya sinergi antar pelaksana dalam memenuhi prinsip 6T. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar program bisa lebih tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang.

Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (2007), yang menyoroti tiga indikator utama, yaitu sasaran tepat, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan, sebagai kerangka untuk menilai pelaksanaan BPNT di Desa Bangun. Sasaran tepat berhubungan dengan keakuratan data KPM sesuai DTKS agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sedangkan sosialisasi program mengevaluasi seberapa baik masyarakat memahami mekanisme dan tujuan BPNT, dan pencapaian tujuan mengukur dampak program dalam meningkatkan akses pangan dan mengurangi beban ekonomi secara berkelanjutan. Meskipun sebelumnya banyak penelitian yang membahas aspek teknis pelaksanaan BPNT di berbagai tempat (Budiyantri et al., 2023). kajian di tingkat desa masih sangat jarang, terutama dalam menilai efektivitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut melalui analisis di tingkat lokal, mengingat di lapangan masih ada masalah seperti data DTKS yang tidak akurat, sosialisasi yang kurang maksimal, serta pencapaian tujuan yang belum optimal akibat masalah distribusi dan kualitas bantuan, sehingga evaluasi yang berdasarkan indikator Budiani sangat penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan berkelanjutan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program BPNT memiliki peran dalam meningkatkan akses terhadap kebutuhan pangan dan mengurangi beban

ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu, meskipun masih terdapat berbagai tantangan. Penelitian oleh (Puspita, 2023) mengungkapkan bahwa BPNT berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan, namun mengalami hambatan terkait keterlambatan distribusi, kurangnya pilihan yang tersedia, dan minimnya sosialisasi. Temuan dari (Zakaria Habib Al-Ra'zie et al., 2025) juga membuktikan bahwa BPNT efektif dalam bentuk non-tunai, tetapi tetap mengalami kesulitan dalam hal akurasi data dan koordinasi, sementara (Pratiwi & Sukmana, 2022) menegaskan bahwa bantuan sosial seperti BLT dan sembako sangat berpengaruh dalam menjaga kemampuan belanja masyarakat di masa pandemi. Di sisi lain, hasil pengamatan di Desa Bangun menunjukkan bahwa pelaksanaan BPNT masih menghadapi masalah seperti ketidakakuratan data DTKS, rendahnya sosialisasi, keterlambatan dalam penyaluran, serta kurangnya kerja sama antara pelaksana dan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti efektivitas BPNT di Desa Bangun dengan menerapkan teori Budiani (2007) yang menekankan pada indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, dan pencapaian tujuan.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yakni metode yang menurut (Creswell, 2007) berfungsi untuk memahami makna suatu fenomena sosial melalui sudut pandang partisipan (Creswell, 2009). Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di tingkat desa, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian berlokasi di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dipilih secara purposive (Lenaini et al., 2021). Tempat penelitian berada di Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dipilih karena populasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang cukup besar, serta mencerminkan wilayah semi-perkotaan dengan karakteristik pendistribusian bantuan yang unik.

Sumber informasi untuk penelitian terdiri dari Kepala Desa Bangun, Dedik Ishariyanto, dan Kaur Umum Desa Bangun, Mashuri Para informan dipilih secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki keterlibatan langsung serta pemahaman mendalam tentang proses penyaluran, tantangan administratif, dan hasil dari program BPNT (Widiatmika, 2019a). Pengumpulan

informasi dilakukan melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur, observasi partisipatif, serta pengumpulan dokumen. Wawancara ini ditujukan untuk menggali informasi mengenai ketepatan sasaran, sosialisasi program, cara distribusi, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Observasi dilakukan dengan mengikuti proses penyaluran bantuan secara langsung, sedangkan dokumentasi meliputi analisis terhadap DTKS, laporan dari Dinas Sosial, dan arsip desa sebagai sumber data pendukung. Proses analisis data menggunakan metode analisis tematik dengan tahapan: (1) pengurangan data melalui pengkodean untuk menemukan tema-tema utama, (2) penyajian data dalam format naratif deskriptif serta tabel untuk memudahkan pemahaman, dan (3) pembuatan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antar tema yang diperoleh di lapangan.

Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi secara terstruktur, yang terdiri dari: (1) triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan, (2) triangulasi metode dengan mencocokkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta (3) triangulasi data dengan membandingkan hasil penelitian lapangan dengan dokumen resmi seperti DTKS dan laporan Dinas Sosial. Selain itu, peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan untuk menjamin kesesuaian antara interpretasi peneliti dan realitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas pelaksanaan BPNT di Desa Bangun, khususnya dalam hal ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pencapaian tujuan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran adalah parameter utama dalam mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial, yang menurut Budiani (2007) berkaitan dengan kemampuan kebijakan untuk menjangkau kelompok penerima yang memenuhi syarat secara adil dan berdasarkan kebutuhan. Parameter ini tidak hanya bergantung pada keakuratan data administratif semacam DTKS, tetapi juga pada proses verifikasi sosial di lapangan, kolaborasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat. Dalam konteks BPNT di Desa Bangun, yang memiliki kondisi sosial

ekonomi yang beragam dan sebagian masyarakatnya berpenghasilan rendah, ketepatan sasaran menjadi sangat penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat. Pelaksanaan BPNT dilakukan berdasarkan data DTKS yang dikelola dalam SIKS-NG, kemudian diverifikasi oleh pemerintah desa bersama RT/RW dalam musyawarah desa untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata masyarakat, sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat dan tidak tumpang tindih dengan program lain seperti PKH atau BLT Dana Desa.

Pelaksanaan BPNT di Desa Bangun menunjukkan adanya kerja sama antara pendamping BPNT dan pemerintah desa, terutama Kaur Kesra yang memiliki peran dalam memberikan dukungan administratif dan memverifikasi data penerima. Kaur Kesra memiliki tanggung jawab untuk memastikan data yang akurat, melakukan verifikasi yang jelas, serta mengatur perubahan data melalui proses musyawarah desa sebelum diajukan ke Dinas Sosial. Namun, keterbatasan sistem SIKS-NG yang hanya menampilkan data tahun berjalan tanpa riwayat historis menjadi hambatan, karena menghalangi desa dalam menilai perubahan status penerima dan efektivitas penargetan bantuan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mashuri, selaku Kaur Kesra Desa Bangun, diperoleh pemahaman mendalam mengenai prosedur verifikasi data penerima BPNT. Ia mengungkapkan;

“Setiap awal tahun kami menerima data dari Dinas Sosial melalui DTKS. Data tersebut kami bawa ke musyawarah desa bersama dengan RT dan RW untuk diperiksa kembali, guna memastikan apakah penerimanya masih memenuhi syarat. Kami mengunjungi rumah-rumah warga untuk menilai keadaan ekonomi dan rutinitas mereka. Jika ada yang sudah mampu, pindah, atau telah meninggal, kami membuat daftar pengganti. Semua laporan tersebut kami kirimkan ke Dinsos melalui TSKS. Namun, masalahnya adalah aplikasi SIKS-NG hanya menampilkan data tahun berjalan, jadi untuk melihat data dari tahun-tahun sebelumnya, kami harus mengajukan permintaan langsung ke Dinas Sosial. Kadang-kadang warga bertanya kenapa ada yang baru mendapatkan, dan ada yang tidak, kami sulit menjelaskannya karena informasi yang ada di sistem terbatas.” (Wawancara, 5 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses verifikasi dilakukan secara aktif oleh aparatur desa dengan pendekatan sosial yang didasarkan pada musyawarah dan pengamatan langsung. Nde memiliki peran penting dalam memastikan akurasi penerima manfaat melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Walaupun sudah diterapkan sistem digital, keterbatasan akses

terhadap data historis yang tersedia membuat proses validasi tidak dapat dilakukan secara keseluruhan antarperiode.

Selanjutnya, hasil wawancara yang dilakukan dengan Dedik Ishariyanto, selaku Kepala Desa Bangun, semakin menegaskan penjelasan tersebut. Menjelaskan;

“Kami di desa bertanggung jawab untuk menjamin bahwa data penerima benar-benar sesuai dengan kenyataan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum kami mengirimkan ke Dinas Sosial, kami melakukan verifikasi terlebih dahulu bersama perangkat RT dan RW. Semua hal disampaikan secara terbuka melalui musyawarah desa. Namun, karena tidak ada pendamping BPNT, perangkat desa harus turun langsung jika ada warga yang mengajukan protes atau meminta penjelasan. Kami pastikan bahwa jika ada yang tidak layak akan diganti, tetapi untuk data yang lama kami tidak memiliki arsip digitalnya karena sistem dari pusat tidak menunjukkan riwayat. Jadi, untuk melihat perubahan dari tahun lalu, kami harus meminta ke Dinsos melalui surat resmi.” (Wawancara, 6 November 2025).

Hasil wawancara dan pengamatan menjelaskan bahwa penentuan sasaran BPNT di Desa Bangun sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat melalui proses musyawarah desa dan didukung oleh administrasi yang cukup transparan, dengan pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara sistem pusat dan kondisi setempat. Namun, kekurangan pada sistem data membuat proses evaluasi belum berjalan secara menyeluruh dengan optimal. Dalam hal dokumentasi, terungkap bahwa data penerima BPNT telah dikelola secara digital melalui aplikasi desa terintegrasi, dengan sekitar 100 KPM yang status keaktifannya tercatat secara elektronik dan dapat diakses untuk berbagai keperluan verifikasi. Sistem ini mempermudah kerjasama antara pemerintah desa, pendamping BPNT, dan Dinas Sosial dalam memastikan akurasi sasaran. Meskipun begitu, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan data masih terbatas pada aspek administratif dan belum sepenuhnya digunakan untuk menganalisis perubahan dalam kondisi sosial ekonomi penerima secara berkelanjutan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa penerima BPNT di Desa Bangun terjaga melalui musyawarah desa yang melibatkan partisipasi masyarakat. Proses ini memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Validasi dilakukan dengan mendatangi rumah penerima, memastikan keputusan berdasar data nyata. Namun, masalah utama terletak pada sistem digital yang terpusat, yang tidak menyimpan riwayat penerima dan memperbaharui data secara tahunan. Ketergantungan pada informasi dari Kementerian Sosial membatasi desa dalam

memperbaiki data. Ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penentuan sasaran jika keadaan ekonomi berubah. Keterlibatan Kaur Kesra dan Kepala Desa dalam verifikasi lapangan dapat mengurangi kesalahan distribusi. Musyawarah memperkuat keabsahan verifikasi karena keputusan diambil secara kolektif dan transparan.

Hasil studi menunjukkan bahwa akurasi penyaluran BPNT di Desa Bangun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan ketidakakuratan informasi dalam DTKS. Secara nyata, teridentifikasi adanya kesalahan inklusi (penerima tidak berhak) dan kesalahan eksklusi (masyarakat yang membutuhkan belum terdaftar). Masalah ini muncul tidak hanya karena kurangnya pembaruan informasi, tetapi juga disebabkan oleh keterbatasan sistem seperti SIKS-NG yang tidak menyediakan data sejarah mengenai perubahan status sosial ekonomi masyarakat secara mendalam. Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi bersifat reaktif, bukan bersifat prediktif. Di samping itu, keterbatasan kemampuan aparat desa dalam melakukan validasi informasi secara rutin juga memperburuk situasi ini.

Secara analitis, kondisi ini menggambarkan adanya perbedaan antara rancangan kebijakan berbasis data nasional dengan kenyataan lokal yang terus berubah. Dalam pandangan teori Budiani (2007), ketidaktepatan dalam penyaluran ini menunjukkan bahwa indikator efektivitas program belum berjalan dengan baik. Selain itu, fenomena ini mencerminkan adanya dualisme peran pemerintah desa, di mana desa berfungsi tidak hanya sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memahami kondisi nyata masyarakat. Ketika kedua peran ini tidak seimbang, akurasi data menjadi terganggu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan integrasi sistem data yang fleksibel serta penguatan kapasitas desa dalam memperbaharui informasi berdasarkan partisipasi masyarakat agar kebijakan dapat menjadi lebih responsif dan tepat sasaran.

Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan elemen kedua dari teori efektivitas yang dijelaskan oleh Budiani (2007), yang berfungsi untuk mengevaluasi seberapa baik pelaksana kebijakan dapat menginformasikan masyarakat tentang prosedur, mekanisme, dan tujuan program dengan jelas. Tingkat efektivitas sosialisasi mencerminkan kemampuan komunikasi publik pemerintah dalam menanamkan

pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga, serta memperkuat keterbukaan dalam pelaksanaan program. Dalam ranah kebijakan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sosialisasi memiliki peran vital sebagai penghubung antara perumusan kebijakan di tingkat pusat dengan tingkat pemahaman di tingkat masyarakat. Semakin efektif dan sesuai metode sosialisasi dilaksanakan, semakin tinggi partisipasi serta kepatuhan masyarakat terhadap program tersebut. Sebaliknya, kurangnya sosialisasi bisa memicu kesalahpahaman administratif, minimnya pengetahuan tentang kebijakan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Desa Bangun yang menjadi lokasi penelitian terletak di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, dengan luas sekitar 174 hektar dan populasi lebih dari 3.000 jiwa. Secara sosial, tingkat pendidikan dan akses informasi di desa ini bervariasi. Sebagian penerima BPNT merupakan kelompok usia lanjut dan pekerja informal yang tidak familiar dengan teknologi digital seperti aplikasi perbankan atau platform online. Situasi ini menjadikan proses sosialisasi sangat penting untuk menjamin kelancaran program. Dari segi struktur, pelaksanaan sosialisasi program BPNT di Desa Bangun dilaksanakan oleh pemerintah desa tanpa adanya pendampingan khusus dari Dinas Sosial. Tanggung jawab utama berada di bawah pengawasan Kaur Kesra (Mashuri), yang berfungsi sebagai penghubung antara penerima manfaat dengan Dinas Sosial. Kepala Desa Dedik Ishariyanto terlibat aktif dalam mengawasi sosialisasi agar prosesnya berlangsung secara transparan dan menghindari kebingungan di kalangan publik. Umumnya, sosialisasi dilakukan menjelang penyaluran bantuan di balai desa, dengan pendekatan tatap muka antara aparat dan penerima.

Proses sosialisasi dimulai dengan informasi tentang jadwal pencairan, jumlah bantuan, dan cara pengambilan dana melalui BNI atau ATM. Pemerintah desa mengumumkan bahwa BPNT sekarang hanya berupa uang tunai yang diterima di rekening, bukan bahan pangan seperti sebelumnya. Sosialisasi berlangsung terbuka, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang masalah administratif. Selain pertemuan resmi, sosialisasi juga dilakukan secara informal di kantor desa. Namun, kurangnya sarana komunikasi seperti papan informasi dan media sosial membuat informasi tidak tersebar merata, terutama di kalangan penerima manfaat lanjut usia yang masih bergantung pada penjelasan dari desa

atau tetangga. Hal ini menciptakan kesenjangan antara komunikasi dan pemahaman masyarakat. Sosialisasi di Desa Bangun sudah membangun hubungan sosial yang baik, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menyebarkan informasi. Hasil wawancara dengan Mashuri (Kaur Kesra) memberikan detail tentang pelaksanaan sosialisasi BPNT di Desa Bangun.

“Biasanya, kami mengumpulkan semua penerima sebelum penyaluran bantuan. Kami menjelaskan bahwa saat ini BPNT tidak lagi berupa sembako, tetapi uang yang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Kami juga memberikan informasi mengenai jadwal penyaluran dan cara mengambil uang di ATM atau agen BNI. Untuk mereka yang belum mengerti, kami menyediakan bantuan praktik secara langsung. Terkadang, ada warga baru yang belum tahu tentang bantuan ini, dan kami membantu membuat kartu serta mendaftarkan mereka melalui operator. Jika ada yang tidak menerima, kami memeriksa di aplikasi SIKS-NG, seringkali karena data yang ada berbeda dengan Capil atau rekening yang sudah tidak aktif. Kami juga membantu membuat surat pengantar ke Dinas Sosial agar mereka dapat memperbaikinya”. (Wawancara, 5 November 2025).

Penjelasan Kaur Kesra menunjukkan bahwa sosialisasi di Desa Bangun dilakukan dengan pendekatan yang personal dan partisipatif. Ia tidak hanya memberikan informasi teknis, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada penerima manfaat yang kesulitan dalam memahami mekanisme digital. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kaur Kesra melampaui fungsi administratif, menjadi fasilitator sosial yang mencoba menjembatani keterbatasan literasi digital warga dengan tuntutan sistem BPNT yang berbasis non-tunai. Sementara itu, Kepala Desa Dedik Ishariyanto menegaskan dalam wawancara pada 6 November 2025 mengenai peran penting pemerintah desa dalam memastikan transparansi informasi program. Ia menyatakan,

“Kami ingin masyarakat memahami bahwa BPNT adalah program dari pemerintah pusat untuk mendukung ketahanan pangan. Setiap kali ada pencairan, kami selalu mendampingi warga agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan atau penipuan. Kami menyarankan agar penggunaan uang bantuan diarahkan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk hal-hal lain. Sosialisasi kami lakukan secara langsung karena sebagian warga tidak aktif menggunakan ponsel atau media sosial. Jika ada masalah, seperti bantuan yang tidak masuk, kami membantu berkomunikasi dengan Dinsos melalui TKSK. Dengan demikian, desa berfungsi sebagai jembatan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan masyarakat tahu bagaimana cara mengelolanya.” (Wawancara, 6

November 2025).

Dari dua wawancara, terlihat bahwa sosialisasi program di Desa Bangun fokus pada pelayanan langsung. Kedua informan menyoroti peran aktif pemerintah desa dalam transparansi informasi dan pendampingan warga saat pelaksanaan BPNT. Komunikasi dilakukan secara langsung dan dialogis, sesuai dengan karakter sosial komunitas yang belum sepenuhnya digital. Pendekatan tatap muka dianggap efektif untuk kelompok dengan literasi digital rendah. Ini juga memperkuat ikatan emosional dan rasa percaya. Namun, strategi ini bisa menyebabkan informasi tidak tersip dengan baik dan sulit dilacak jika terjadi kesalahan administrasi.

Proses sosialisasi yang berlangsung di Desa Bangun lebih bersifat reaktif dibandingkan proaktif. Pemerintah desa biasanya hanya melakukan komunikasi intensif saat penyaluran bantuan atau ketika muncul masalah teknis seperti kegagalan penyaluran, perbedaan data, atau rekening yang tidak aktif. Oleh karena itu, peran sosialisasi lebih banyak berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah, ketimbang membangun pemahaman kebijakan secara menyeluruh. Dalam kacamata efektivitas kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan administratif tercapai, sisi edukatif dari sosialisasi belum terlaksana secara maksimal.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebaran informasi terkait program BPNT di Desa Bangun belum efektif, terlihat dari masih rendahnya pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai cara kerja program ini, termasuk pemakaian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan tujuan dari bantuan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan lebih bersifat satu arah dan hanya mencakup penyampaian informasi teknis tanpa menjelaskan makna program secara mendalam. Hal ini dipengaruhi oleh terbatasnya waktu, sumber daya, serta metode komunikasi yang belum melibatkan partisipasi aktif.

Secara analisis, lemahnya penyebaran informasi bukan hanya masalah teknis, tetapi mencerminkan kurangnya pergeseran dari pendekatan administratif ke pendekatan pemberdayaan. Dalam konteks teori Budiani (2007), situasi ini menunjukkan bahwa indikator sosialisasi belum tercapai dengan baik. Di samping itu, fenomena ini kembali menyoroti adanya dualisme dalam peran pemerintah desa, di mana seharusnya desa tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi fasilitator untuk pembelajaran sosial bagi warga. Jika fungsi pendampingan

ini tidak berjalan dengan baik, maka program hanya dipersepsikan sebagai bantuan biasa, bukan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Implikasi kebijakan dari temuan ini menunjukkan pentingnya model sosialisasi yang bersifat komunitas, interaktif, berkelanjutan, dan disertai pendidikan ekonomi agar masyarakat semakin mandiri.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan indikator ketiga dalam teori efektivitas menurut Budiani (2007) yang mengevaluasi seberapa jauh hasil dari suatu kebijakan sesuai dengan sasaran dan niat yang telah ditetapkan. Indikator ini lebih mengutamakan kemampuan program dalam memberikan efek positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, dan bukan hanya menyelesaikan tugas administratif semata. Pencapaian tujuan melibatkan dimensi hasil (output) dan manfaat (outcome), yaitu sejauh mana program tidak hanya terlaksana, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi dari mereka yang menerima manfaat. Dalam kerangka Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pencapaian tujuan dievaluasi berdasarkan sejauh mana bantuan tersebut dapat memastikan ketahanan pangan, mengurangi beban biaya hidup bagi keluarga miskin, serta memperkuat kemandirian ekonomi dari para penerima. Oleh karena itu, efektivitas pencapaian tujuan tidak hanya bergantung pada keakuratan mekanisme distribusi, tetapi juga pada sejauh mana pelaksana dapat menciptakan dampak sosial yang berkesinambungan pada tingkat lokal.

Desa Bangun, yang merupakan salah satu desa dengan jumlah penerima bantuan sosial yang relatif tinggi di Kecamatan Pungging, dijadikan contoh representatif untuk mengkaji efektivitas pencapaian tujuan dari program BPNT. Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan pejabat desa, terungkap bahwa sistem distribusi BPNT di Desa Bangun telah sepenuhnya beralih dari bentuk bantuan barang (sembako) menjadi sistem transfer uang tunai melalui rekening penerima yang dikelola oleh Bank BNI. Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 setiap tiga bulan, yang setara dengan Rp200.000 per bulan, dan dapat diakses melalui agen BNI atau ATM yang ditunjuk.

Perubahan sistem ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam distribusi serta transparansi finansial. Dengan

penerapan sistem perbankan digital, pemerintah berharap proses distribusi akan berjalan lebih cepat, akuntabel, dan meminimalkan risiko penyimpangan pada tingkat pelaksana. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas sistem baru ini di Desa Bangun masih menemui berbagai tantangan teknis dan administratif. Tidak semua penerima bantuan memahami prosedur perbankan digital dengan baik. Banyak dari mereka, terutama di kalangan lanjut usia dan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah, masih memerlukan bimbingan saat mengambil dana atau dalam mengajukan keluhan ketika bantuan tidak keluar.

Peranan pemerintah desa, khususnya Kaur Kesra (Nde) dan Kepala Desa Dedik Ishariyanto, sangat penting dalam menjembatani hubungan antara penerima bantuan dan sistem digitalisasi keuangan tersebut. Kaur Kesra memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi data penerima, menanggapi pengaduan, serta memastikan bahwa dana yang belum tersalurkan dapat segera diproses. Sementara itu, Kepala Desa berfungsi sebagai pengawas dan pengambil keputusan strategis untuk memastikan bahwa semua warga yang memenuhi syarat mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan pengamatan, sistem ini menciptakan dinamika baru dalam pelayanan publik: di satu sisi, efisiensi meningkat, namun di sisi lain, beban administratif dan teknis pada tingkat desa juga bertambah.

Pencapaian sasaran BPNT di Desa Bangun tidak hanya dinilai dari penyaluran bantuan kepada para penerima, tetapi juga dari pengaruh sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Menurut informasi dari narasumber, mayoritas penerima menggunakan dana bantuan untuk memenuhi keperluan dasar seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayuran. Ini sejalan dengan tujuan utama program yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan bagi keluarga yang kurang mampu. Namun, sampai penelitian ini dilakukan, belum ada mekanisme monitoring resmi untuk mengevaluasi apakah bantuan itu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Pemerintah desa hanya berperan memastikan proses pencairan berjalan dengan baik, tanpa memiliki indikator yang terukur untuk perubahan sosial ekonomi para penerima.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Mashuri (Kaur Kesra), dijelaskan dengan rinci langkah-langkah yang diambil ketika bantuan tidak berhasil disalurkan. Ia menyatakan:

"Apabila ada warga yang melapor bahwa bantuannya belum diterima, kami akan mengunjungi rumahnya terlebih dahulu untuk memverifikasi apakah kartunya masih aktif. Setelah itu, kami memeriksa melalui aplikasi SIKS-NG menggunakan nomor KK. Di aplikasi biasanya terdapat informasi, seperti data Capil yang tidak sesuai, rekening yang tidak aktif, atau masalah dalam verifikasi bank. Setelah mengetahui penyebabnya, kami akan membantu menyusun surat pengantar dari desa ke Dinas Sosial melalui TKSK. Terkadang kami juga mendampingi langsung warga ke agen BNI jika mereka mengalami kesulitan dalam menarik uang. Ada pula yang kehilangan kartu atau lupa PIN, sehingga kami membantu membuat surat keterangan untuk mencetak kartu baru di bank. Proses ini biasanya memerlukan waktu antara satu hingga dua minggu hingga uang dapat dicairkan. " (Wawancara, 5 November 2025).

Informasi tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi BPNT di Desa Bangun sangat tergantung pada peran pemerintah desa dalam mengatasi masalah-masalah administratif. Sistem pengaduan dilakukan secara langsung dan berbasis pelayanan, di mana aparatur desa tidak sekadar berfungsi dalam kapasitas administratif, tetapi juga menjadi pendamping sosial bagi penerima bantuan. Kaur Kesra berperan sebagai penghubung antara warga, lembaga perbankan, dan Dinas Sosial agar masalah teknis dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Dedik Ishariyanto menjelaskan upaya pemerintah desa untuk memastikan bahwa penyaluran berjalan dengan transparan dan sesuai dengan sasaran. Ia mengungkapkan:

"Kami memastikan bahwa semua penerima BPNT menerima haknya secara tepat waktu. Jika terjadi masalah seperti penyaluran yang gagal, kami meminta Kaur Kesra untuk turun langsung mengecek ke lapangan dan berkoordinasi dengan TKSK. Semua pengaduan dicatat agar ada jejak administrasi. Kami juga berusaha memastikan bahwa dana bantuan digunakan untuk keperluan dasar dan bukan untuk hal-hal lain. Namun, kami tidak memiliki wewenang untuk memantau secara langsung bagaimana penggunaan dana tersebut, karena itu merupakan ranah pribadi para penerima. Yang terpenting bagi kami adalah memastikan bantuan disalurkan dengan baik dan tidak ada yang terlewat. " (Wawancara, 6 November 2025).

Tabel 4 di bawah ini, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mengalami perubahan yang tidak konsisten. Terjadi pengurangan pada tahun 2018, 2019, 2022, dan 2024, sementara peningkatan terlihat sepanjang pandemi pada tahun 2020 hingga 2021. Penurunan paling signifikan tercatat antara

tahun 2021 dan 2022, mencapai 9,51 ribu jiwa. Pola tersebut sejalan dengan waktu ketika bantuan pangan non-tunai meningkat secara nasional, sehingga diduga bahwa inisiatif seperti BPNT berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan pada keluarga miskin. Di samping itu, penurunan juga tampak di tahun 2023 hingga 2024 dengan penurunan sebesar 4,14 ribu jiwa. Meskipun penurunan ini tidak sebesar penurunan tahun sebelumnya, pola ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program bantuan pangan memiliki pengaruh positif terhadap stabilitas kesejahteraan KPM. Oleh karena itu, data yang diperoleh memperkuat pernyataan para informan bahwa tujuan dari program ini bukan hanya untuk memberikan bantuan sementara, tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi secara berangsur-angsur.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto Tahun 2017–2024

Periode	Selisih Jumlah Miskin	Keterangan
2017 - 2018	-0,24 ribu	turun
2018 - 2019	-2,74 ribu	turun
2019 - 2020	+10,0 ribu	naik (pandemi)
2020 - 2021	+1,74 ribu	naik
2021 - 2022	-9,51 ribu	turun signifikan
2022 - 2023	+1,83 ribu	naik
2023 - 2024	-4,14 ribu	turun signifikan

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan BPNT di Desa Bangun lebih tertumpu pada aspek distribusi daripada dampak jangka panjang. Program ini secara fungsional sukses dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mengurangi beban ekonomi melalui sistem bantuan tunai yang lebih fleksibel dan efisien. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rahman et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa BPNT efektif dalam mengurangi pengeluaran untuk pangan, tetapi belum bisa meningkatkan kesejahteraan dalam jangka panjang. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh variabel teknis seperti ketidakakuratan data, masalah dalam penyaluran, serta kekurangan sistem SIKS-NG yang tidak menyediakan data masa lalu, sehingga evaluasi yang berkelanjutan menjadi sulit dilaksanakan (Hermawan, 2021). Oleh karena itu, BPNT lebih berfungsi sebagai penstabil konsumsi ketimbang sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari sudut pandang analitis, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program masih belum optimal menurut Budiani (2007), karena belum menghasilkan perubahan struktural. Ini juga menekankan adanya dualisme peran

pemerintah desa antara fungsi distribusi bantuan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, perlu dilakukan integrasi antara BPNT dan program pemberdayaan ekonomi lokal agar manfaatnya bisa lebih berkelanjutan dan tidak hanya bersifat konsumtif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, pelaksanaan BPNT di Desa Bangun menunjukkan bahwa program ini berjalan melalui kombinasi antara sistem administrasi digital (SIKS-NG) dan mekanisme sosial yang melibatkan verifikasi di lapangan oleh pemerintah desa dan pendamping BPNT. Secara umum, indikator efektivitas seperti ketepatan sasaran, prosedur layanan, dan pelaksanaan program telah terpenuhi secara fungsional, terutama dalam hal distribusi bantuan dan penanganan masalah teknis di lapangan. Namun demikian, efektivitas program masih dihadapkan pada masalah struktural, khususnya keterbatasan sistem SIKS-NG yang belum menyajikan data historis (longitudinal), sehingga menghalangi evaluasi jangka panjang mengenai keberlanjutan penerima manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa isu utama bukan terletak pada kapasitas kelembagaan desa, melainkan pada keterbatasan sistem data yang digunakan, yang mengakibatkan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data belum optimal.

Saran

Penelitian berikutnya dianjurkan untuk memperluas wilayah dan rentang waktu agar dapat membandingkan efektivitas BPNT di berbagai daerah serta menganalisis dampak jangka panjang dari program tersebut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Di sisi kebijakan, perlu ada penguatan dalam sistem pengelolaan data sosial, terutama melalui pengembangan fitur data historis di SIKS-NG oleh Kementerian Sosial, agar evaluasi penerima manfaat dapat dilakukan secara berkelanjutan dan lebih tepat. Dinas Sosial Kabupaten juga harus meningkatkan bimbingan serta pelatihan kepada perangkat desa mengenai pengelolaan data dan pemanfaatan sistem digital untuk memperkuat kemampuan teknis di tingkat lokal. Di level desa, diharapkan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif,

tetapi juga sebagai pendukung sosial dengan memperkuat sosialisasi program dan menghubungkan BPNT dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, diperlukan model pendampingan yang terorganisir dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara TKSK, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga program BPNT bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). In *Lutfi Alfia/ JIAP* (Vol. 2, Number 3).
- Hermawan, I. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(2), 131–145. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i2.2237>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (V. Knight, Ed.; third edit). SAGE Publications, Inc. All.
- Feny Sahara, Faizal Anwar, & Titi Darmi. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(2), 107–117. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v4i2.4689>
- Firdausya, L. Z., & Ompusunggu, D. P. (2023). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Era Digital Abad 21. *Tali Jagad Journal*, 1(1), 16–20.
- Hadita, A., Nurbudiwati, N., & Andriansyah, A. (2021). Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul. In *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* (Vol. 12, Number 2). <https://doi.org/10.36624/jpkp.v12i2.80>
- Puspita, K. S. R. (2023). *Program Pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Desa Gilang*.
- Lenaini, I., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling*. 6(1), 33–39.
- Mawarda, Y. O., Isbandono, P., Febiyanti, A. N., Asmara, M. P., Safitri, Y. D., Septiani, D. W., & Sari, Y. E. K. (2025). *Implementation Of “Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” Program Policy In Ngusikan Village, Jombang Regency* (pp. 2067–2082). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-317-7_185
- Nazalia, D., & Riyadh UB, A. (2022). Effectiveness of the Cepet Mule Program in Administrative Services. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 19, 3–7. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v19i0.1240>
- Nizar Purnama, I. (2023). *Evaluasi Kebijakan Sosial (Studi Pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kota Serang)* (Vol. 13).
- Normalita, P., & Sekarini, D. (2022). *Efektivitas Program Bantuan Sembako Terdampak Covid-19 di Desa Wunut Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo The Effectiveness of the Staple Food Assistance Program Affected by Covid-19 in Wunut Village, Porong District, Sidoarjo Regency*.
- Oktavia, S., & Djamaluddin, S. (2024). The Effect of E-Warong Accessibility on Household Consumption. In *Asian Journal of Social and Humanities* (Vol. 2, Number 6).

- <https://doi.org/10.59888/ajosh.v2i6.267>
- Pramesti, R., Muhammad, A. S., & Safitri, D. P. (2019). Impelementasi Bantuan Pangan Non Tunai Melalui Elektronik Gotong Royong Di Kota Tanjungpinang. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 81. <https://doi.org/10.20961/sp.v14i1.34583>
- Purnawansa, sena wahyu., Wardhana, Aditya., Renggo, yuniarti reny., Hudang, adrianus kabubu., Darwin., Sayekti, siskha putri., Nugrohowardani, rambu luba kata respati., Amruddin., Hardiyani, tati., Tondok, santalia banne., & Prisusanti, retno dewi. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Number March).
- Putra, R. E., Putera, R. E., & Aromatica, D. (2022). Implementasi Kebijakan Penyaluran BPNT melalui E-Warong Versus PT Pos Indonesia di Kota Padang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 266–280. <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.4932>
- Rahmawati, S. (2024). Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.25299/jiap.2024.19127>
- Sitompul, K. M., & Rajagukguk, J. (2024). Implementasi Pengelolaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kantor Desa Medan Estate. *Jurnal Fokus Administrasi Publik*.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/japn/article/view/2634%0Ahttps://ejournal.uhn.ac.id/index.php/japn/article/download/2634/1221>
- Praja, D. T. A. (2020). Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kabupaten Garut. In *Jurnal Publik* (Vol. 14, Number 2). <https://doi.org/10.52434/jp.v14i2.26>
- Tris Dina Susanti. (2024). *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka*.
- Widiati, Y. (2024). the Effectiveness of the Non-Cash Food Assistance Program Implementation As an Effort To Handle the Proverty in Panyipatan Village Panyipatan Sub-District Tanah Laut District. *Jurnal PubBis*, 7(1), 2023. <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i1.724>
- Widiatmika, K. P. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Number 2).